

Pengembangan kerjasama antara daerah untuk pengelolaan potensi daerah

Development of cooperation between regions for regional potential management

Bambang Tri Harsanto, Slamet Rosyadi, & Simin

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Universitas Jenderal Soedirman

Jalan HR Bunyamin No. 993 Purwokerto, Jawa Tengah 53122. E-mail: btriharsanto@yahoo.com

Abstract

The specific objective of this research was to map regional economy potential as a basic capital for regional economic development through regional cooperation. This research was undertaken in five regions integrated in regional cooperation institution well known as Barlingmascakeb consisting of Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, and Kebumen. To achieve a regional economy potential map, this research applied the following three methods: (1) Location Quotient (LQ) and Shift Share Analysis (SSA) to identify excellent sectors in each region; (2) Descriptive Method to describe regional typology and determine a regional hierarchy based on sector grouping in agricultural production, trading, and industry; and (3) Klassen Method to describe growth typology based on regional side in each region. Results of this research showed that there were some differences in regional economy potentials assumed excellent and competitive in each region. Each region also has so different capacity in providing agricultural, trading, and industrial infrastructure that regional growth level and regional hierarchy in each region showed different circumstances.

Keywords: regional cooperation, regional excellent sector, regional hierarchy

Abstrak

Secara khusus penelitian ini memiliki target untuk memetakan potensi ekonomi daerah sebagai modal dasar untuk mengembangkan ekonomi wilayah melalui kegiatan kerjasama antar daerah. Penelitian dilakukan di lima kabupaten yang telah tergabung dalam lembaga kerjasama antar daerah Barlingmascakeb yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Untuk melakukan pemetaan potensi ekonomi daerah dilakukan dengan menjawab tiga tujuan penelitian dengan metode yang digunakan adalah: (1) Metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor yang memiliki tingkat kompetitif di masing-masing kabupaten di wilayah Barlingmascakeb; (2) Metode deskriptif untuk mendiskripsikan tipologi wilayah dan menentukan hierarki wilayah berdasarkan pengelompokan sektor produksi pertanian, perdagangan dan industri; dan (3) Metode Klassen untuk mendiskripsikan tipologi pertumbuhan dari sisi daerah pada masing-masing kabupaten di wilayah Barlingmascakeb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan potensi ekonomi daerah yang dianggap unggulan dan kompetitif di masing-masing kabupaten. Antar kabupaten juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyediakan sarana prasarana bidang pertanian, perdagangan dan industri sehingga tingkat pertumbuhan daerah dan hierarki wilayah di masing-masing kabupaten menunjukkan kondisi yang berbeda-beda.

Kata kunci: hierarki wilayah, kerjasama antar daerah, sektor unggulan daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan dapat lebih mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat ternyata belum dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kegagalan ini disebabkan oleh dampak pelaksanaan otonomi daerah yang telah menimbulkan permasalahan sosial politik dan ekonomi di daerah sehingga

menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bird & Vaillancourt 2000, Kumorotomo 2008). Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kerjasama antar daerah (Agranoef & McGuire 2003, Olberding 2002, Cahyani 2008, Wahyudi 2010). Dengan bekerjasama, berbagai masalah lintas daerah dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ekonomi berupa kecilnya aktivitas perekonomian daerah, sejak 2003 Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen bersepakat untuk bekerjasama dalam wadah lembaga kerjasama antar daerah Barlingmascakeb. Kerjasama antar daerah seharusnya dimaknai sebagai upaya melakukan sinergi pembangunan ekonomi wilayah dengan basis pengembangan potensi sumberdaya ekonomi di masing-masing kabupaten (Wahyudi 2010). Untuk dapat melakukan sinergi tersebut diperlukan pengetahuan mengenai berbagai potensi ekonomi di masing-masing kabupaten anggota bagi pengelola lembaga kerjasama antar daerah agar dapat menggerakkan kabupaten anggota untuk melakukan sinergi dalam mengembangkan potensi ekonomi daerahnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut tidak dimiliki oleh pengelola lembaga kerjasama antar daerah (Harsanto 2012). Akibatnya, lembaga kerjasama antar daerah berpotensi terancam bubar karena tidak didukung dengan format kelembagaan yang kuat (Marjoko 2010).

Dengan bekerjasama potensi sumberdaya ekonomi daerah yang terbatas dapat dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama. Sinergi pembangunan daerah yang dibangun melalui kerjasama antar daerah akan dapat terwujud apabila masing-masing daerah mampu mempetakan berbagai potensi ekonomi daerah yang dimilikinya. Dari pemetaan potensi ekonomi daerah tersebut dapat diketahui sektor-sektor pembangunan apa saja yang dapat dikerjasamakan dengan prinsip saling menguntungkan sehingga masing-masing daerah dapat mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Beberapa studi menunjukkan bahwa kerjasama antar wilayah tidak sekedar mengandalkan integrasi kewilayahan tetapi lebih pada aspek-aspek ekonomi wilayah yang dapat dikerjasamakan (Li & Wu 2012, Zhao 2011). Dengan demikian, fondasi kerjasama antara daerah seperti forum Barlingmascakeb juga akan kuat apabila potensi daerah khususnya sumberdaya ekonomi diantara daerah-daerah yang bekerja sama memiliki peluang yang menguntungkan untuk dikerjasamakan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan penelitian ini difokuskan pada potensi sumberdaya ekonomi apa saja yang dimiliki di tingkat kawasan dan bagaimana tingkat sebarannya di masing-masing kabupaten yang memiliki peluang untuk dikerjasamakan di wilayah Barlingmascakeb.

Metode

Penelitian ini dilakukan di 5 (lima) kabupaten yang tergabung dalam lembaga kerjasama antar daerah BARLINGMASCakeb yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Penelitian dilakukan mulai Mei-Oktober

2013. Sumber data berasal dari data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang digunakan bersumber dari data kabupaten dalam angka, provinsi dalam angka, dan laporan kegiatan SKPD di tingkat kabupaten. Adapun metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengidentifikasi berbagai sektor unggulan di masing-masing daerah yang tergabung dalam lembaga kerjasama antar daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share Analysis* (SSA). (2) Untuk mengetahui tipologi wilayah digunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan struktur ekonomi dari masing-masing kabupaten yang tergabung dalam lembaga kerjasama antar daerah Barlingmascakeb. (3) Untuk menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah pada masing-

masing kabupaten di wilayah Barlingmascakeb dilakukan dengan menggunakan tipologi Klassen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sektor unggulan daerah

Untuk meningkatkan skala ekonomi daerah melalui kegiatan kerjasama antar daerah diperlukan pengetahuan mengenai sektor-sektor unggulan apa saja yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten. Skala ekonomi daerah akan lebih mudah ditingkatkan apabila sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang lebih utama untuk dikembangkan. Hasil analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis *Shift-Share (SSA)* menggambarkan potensi unggulan yang dapat dikembangkan secara bersama dengan daerah lain. Pengembangan potensi unggulan secara bersama akan memberikan sinergi yang lebih besar jika dibandingkan apabila masing-masing daerah mengembangkan potensi unggulannya secara sendiri-sendiri. Apabila nilai LQ lebih besar atau sama dengan 1 maka sektor tersebut adalah sektor unggulan, namun apabila nilai LQ lebih kecil dari 1 maka sektor tersebut bukanlah sektor unggulan di wilayah tersebut. Makna dari sektor unggulan adalah bahwa produk dari sektor tersebut adalah produk ekspor karena berlebih jika hanya untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri, oleh karena itu sektor tersebut sangat layak untuk dikembangkan.

Analisis *Shift-Share* digunakan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah (kabupaten/kota di Provinsi) terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi (Provinsi) sebagai referensi. Perubahan relatif kinerja pembangunan daerah terhadap propinsi dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah (*national growth effect*), pergeseran proporsi (*proportional shift*) mengukur perubahan relatif (naik/turun) suatu sektor daerah terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi, pergeseran diferensial (*differential shift*) mengetahui seberapa kompetitif sektor tertentu daerah dibanding provinsi. Dari ketiga aspek tersebut, besarnya *differential shift* yang menunjukkan tingkat kompetitivenes suatu sektor digabung dengan sektor unggulan di suatu daerah digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu sektor layak untuk dikembangkan dalam konteks kerjasama antar daerah. Dengan demikian, hasil analisis LQ dan SSA dapat digunakan untuk membantu masing-masing kabupaten dalam menentukan pilihan sektor yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lain agar skala ekonomi wilayah dapat ditingkatkan.

Ada beberapa alternatif pilihan pengembangan sektor yang dapat dikerjasamakan oleh masing-masing daerah dalam upaya meningkatkan skala ekonomi daerah antara lain; **Prioritas pertama** adalah sektor tersebut unggulan tetapi memiliki daya saing yang rendah; **Prioritas ke dua**, adalah sektor tersebut bukan unggulan tetapi memiliki daya saing yang tinggi; **Prioritas ke tiga**, adalah sektor tersebut unggulan dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi; dan **Prioritas ke empat** adalah sektor bukan unggulan dengan daya saing yang rendah. Dari berbagai alternatif pilihan tersebut, Gambar 1 menggambarkan prioritas pilihan sektor ekonomi di masing-masing kabupaten yang dapat dikembangkan dengan cara dikerjasamakan antar daerah.

Untuk Kabupaten Banjarnegara, sektor bangunan merupakan sektor prioritas pertama yang layak untuk dikerjasamakan dengan daerah lain dalam rangka untuk meningkatkan skala ekonomi daerah. Sektor listrik, gas dan air minum dan sektor angkutan/komunikasi merupakan sektor prioritas ke dua yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lain.

Kabupaten	LQ 2007- 2011	Regional Shift SSA (2007-2011)	
		< 0	≥ 0
Baniarnegara	< 1	Pertambangan dan Penggalian; Industri; Perdagangan Prioritas 4	Listrik, Gas dan Air Minum; Angkutan/Komunikasi Prioritas 2
	≥ 1	Bangunan Prioritas 1	Pertanian; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa Prioritas 3
Purbalingga	< 1		Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas dan Air Minum; Angkutan/Komunikasi Prioritas 1
	≥ 1		Pertanian; Bangunan; Perdagangan; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa Prioritas 2
Banyumas	< 1	Pertambangan dan Penggalian; Industri Prioritas 4	Pertanian; Listrik, Gas dan Air Minum; Perdagangan Prioritas 2
	≥ 1	Bangunan; Angkutan/Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Prioritas 1	Jasa-Jasa Prioritas 3

Kabupaten	LQ 2007- 2011	Regional Shift SSA (2007-2011)	
		< 0	≥ 0
Cilacap	< 1	Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas dan Air Minum; Angkutan/Komunikasi Prioritas 4	Bangunan; Jasa-Jasa Prioritas 2
	≥ 1	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Prioritas 1	Pertanian; Perdagangan Prioritas 3
Kebumen	< 1	Industri; Listrik, Gas dan Air Minum; Bangunan; Perdagangan; Angkutan/Komunikasi Prioritas 3	
	≥ 1	Pertambangan dan Penggalian; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa Prioritas 1	Pertanian Prioritas 2

Sumber: Data sekunder diolah

Gambar 1.
Prioritas sektor untuk dikerjasamakan antar kabupaten

Sektor prioritas ke tiga yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lain adalah sektor pertanian, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa- Jasa. Sektor prioritas ke empat yang dapat dikerjasamakan oleh Kabupaten banjarnegara adalah sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Industri dan sektor Perdagangan.

Untuk Kabupaten Purbalingga dari sembilan sektor ekonomi sebagai penopang struktur ekonomi daerah, sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Industri, sektor Listrik, Gas dan Air Minum serta sektor Angkutan/Komunikasi layak untuk dikerjasamakan sebagai prioritas pertama. Sedangkan prioritas ke dua yang dapat dikerjasamakan adalah sektor Pertanian, Bangunan, Perdagangan, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-Jasa.

Di Kabupaten Banyumas sektor Bangunan, Angkutan/Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan merupakan sektor prioritas pertama yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lain. Sektor prioritas ke dua yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lain adalah sektor Pertanian, Listrik, Gas dan Air Minum dan sektor Perdagangan. Sektor prioritas ke tiga adalah jasa. Sedangkan prioritas ke empat adalah sektor Pertambangan dan Penggalan serta sektor Industri.

Di Kabupaten Cilacap memiliki empat prioritas sektor ekonomi yang dapat dikerjasamakan. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan merupakan sektor prioritas pertama yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lain. Sektor Bangunan dan Jasa-Jasa merupakan sektor prioritas kedua yang dapat dikerjasamakan dengan kabupaten lain. Sektor prioritas ke tiga adalah sektor Pertanian dan Perdagangan. Sedangkan sektor prioritas ke empat adalah sektor Pertambangan dan Penggalan, Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, dan sektor Angkutan/Komunikasi.

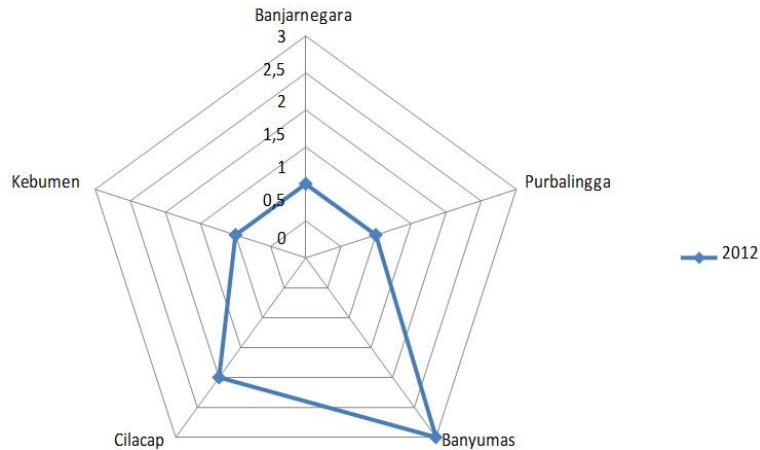
Di Kabupaten kebumen sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-Jasa merupakan sektor pertama yang dapat dikerjasamakan pengembangannya dengan kabupaten lain. Prioritas ke dua sektor yang dapat dikerjasamakan dengan kabupaten lain adalah sektor pertanian. Sedangkan sektor prioritas ke tiga yang dapat dikerjasamakan dengan kabupaten lain adalah sektor Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan, Perdagangan dan sektor Angkutan/Komunikasi.

Kondisi tipologi dan hierarkhi wilayah

Perbedaan kemampuan dari masing-masing daerah dalam mengolah potensi perekonomian yang ada menjadi *output* perekonomian salah satunya disebabkan dari tersedianya sarana dan prasarana wilayah. Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah tersebut dapat digambarkan berdasarkan hirarkhi wilayah. Semakin tinggi hirarkhi wilayah di suatu daerah menggambarkan semakin baik potensi wilayah di daerah tersebut. Dari data yang ada berdasarkan indikator hirarkhi wilayah pertanian, maka tingkatan hirarkhi wilayah pertanian di lima kabupaten di wilayah BARLINGMASCAKEB dapat dilihat pada Gambar 2.

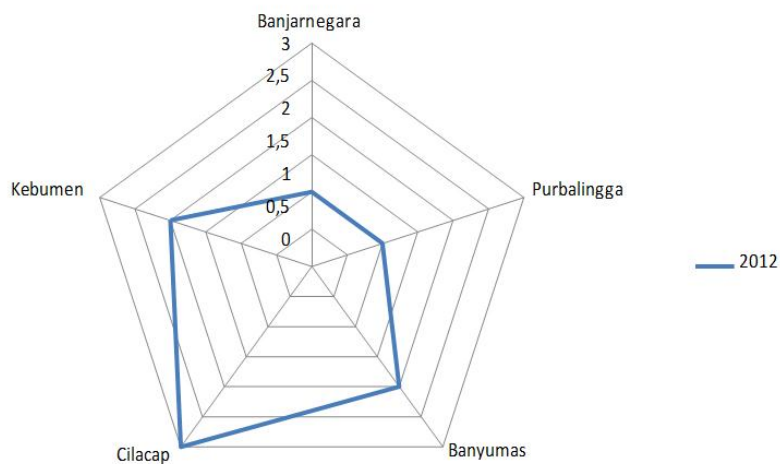
Gambar 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas berada pada posisi hirarkhi I berdasarkan hirarkhi wilayah pertanian di wilayah BARLINGMASCAKEB, disusul Kabupaten Cilacap pada posisi hirarkhi II, sedangkan Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga dan Kebumen berada pada posisi hirarkhi III. Posisi hirarkhi ini pada dasarnya menggambarkan perbedaan kondisi sarana dan prasarana pertanian di kelima kabupaten baik dari sisi kelengkapan maupun jumlahnya.

Dari indikator hirarkhi wilayah perdagangan dan industri, Kabupaten Cilacap berada pada posisi hirarkhi wulayah I, Kabupaten Banyumas dan Kebumen pada posisi hirarkhi wilayah II, sedangkan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga berada pada posisi hirarkhi wilayah III. Posisi hirarkhi wilayah perdagangan dan industri ini menggambarkan perbedaan sarana dan prasarana perdagangan dan industri dari masing-masing kabupaten.



Gambar 2.

Hirarkhi wilayah pertanian kabupaten di wilayah BARLINGMASCAKEB tahun 2012.
Sumber: Data sekunder diolah



Gambar 3.

Hirarkhi wilayah perdagangan dan industri kabupaten di wilayah BARLINGMASCAKEB tahun 2012. Sumber: Data sekunder diolah

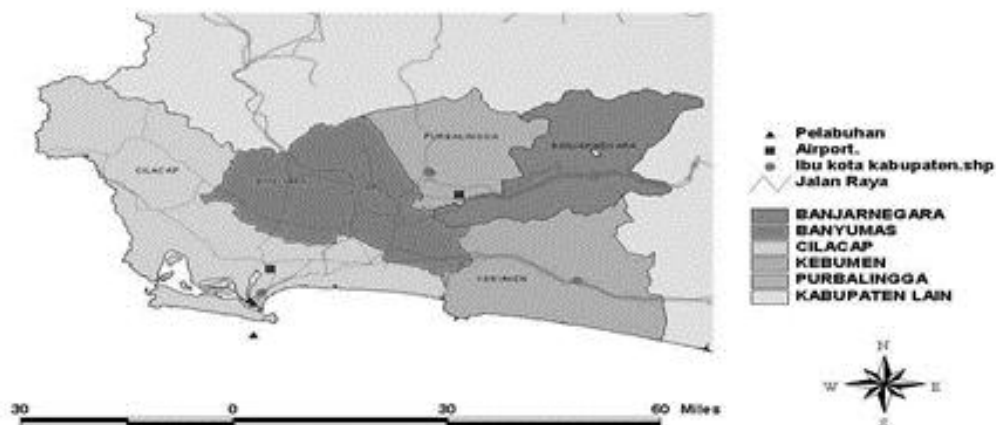
Keberadaan Kabupaten Cilacap pada posisi hirarkhi wilayah I dalam kegiatan perdagangan dan industri menunjukkan bahwa sarana dan prasarana kegiatan perdagangan dan industri di wilayah tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan keempat kabupaten yang lainnya. Di samping karena adanya kemauan dan kemampuan dari masing-masing daerah untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana ini, faktor letak geografis daerah tersebut terhadap kemudahan akses pada daerah sekitar terutama kota-kota besar

yang dianggap menjadi pusat-pusat pertumbuhan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur ini.

Kabupaten Cilacap secara geografis sebenarnya merupakan wilayah yang kurang menguntungkan. Wilayah ini terletak di ujung barat bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Akses dengan menggunakan jalan raya ke daerah ini akan berhenti di Kota Cilacap. Namun, karena Kota Cilacap terletak di sebelah utara Pulau Nusakambangan, kota ini memiliki pelabuhan samudera satu-satunya di wilayah selatan Pulau Jawa. Kabupaten Cilacap juga memiliki sarana perhubungan udara berupa lapangan terbang meskipun hanya baru bisa di darati oleh jenis pesawat dengan kapasitas penumpang yang kecil. Kedua sarana berhubungan laut dan udara tersebut menjadi keunggulan dari Kabupaten Cilacap dibandingkan dengan ke empat kabupaten lainnya. Dengan keunggulan ini makasangat memungkinkan apabila sarana dan prasarana perdagangan dan industri penunjang lainnya di kabupaten ini menjadi cepat berkembang.

Dari peta infrastruktur wilayah (Gambar 4) terlihat bahwa Kabupaten Banyumas menjadi daerah simpul penghubung diantara ke empat kabupaten lainnya. Kabupaten Banyumas juga menjadi simpul jalur darat utama, baik menggunakan jalur jalan raya maupun kereta api di Jawa Tengah selatan bagian barat. Semua akses menuju kota Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta apabila melalui jalur selatan pulau jawa pasti melewati Kabupaten Banyumas. Kondisi ini memungkinkan apabila sarana dan prasarana perdagangan dan industri secara cepat tumbuh di wilayah ini.

Kabupaten Kebumen terletak di sebelah timur Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Kabupaten Kebumen merupakan kota kecil yang berada di jalur darat utama Jawa Tengah bagian selatan. Karena letaknya yang strategis sebagai penghubung jalur antara Yogyakarta ke arah Jakarta maupun ke arah Bandung maka sarana dan prasarana perdagangan dan industri di wilayah ini cukup dapat berkembang dengan baik.



Gambar 4.

Peta infrastruktur kabupaten di wilayah BARLINGMASCAKEB

Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara terletak di sebelah timur dari Kabupaten Banyumas. Kedua kabupaten ini berada pada jalur darat bagian tengah Provinsi Jawa Tengah ke arah Semarang. Karena secara geografis letak kedua kabupaten ini berada di daerah pegunungan maka pengembangan jalur perhubungan darat di wilayah ini hanya dikembangkan sebagai jalur alternatif perdagangan. Oleh karena itu, menjadi sangat bisa

dipahami apabila pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan industri di kedua wilayah ini menjadi sangat terbatas.

Dari indikator hierarkhi wilayah perdagangan dan industri, Kabupaten Banyumas dan Cilacap berada pada posisi hierarkhi wilayah I, Kabupaten Kebumen pada posisi hierarkhi wilayah II, sedangkan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga berada pada posisi hierarkhi wilayah III. Posisi hierarkhi wilayah perdagangan dan industri ini menggambarkan perbedaan sarana dan prasarana perdagangan dan industri dari masing-masing kabupaten. Keberadaan Kabupaten Banyumas dan Cilacap pada posisi hierarkhi wilayah I dalam kegiatan perdagangan dan industri menunjukkan bahwa sarana dan prasarana kegiatan perdagangan dan industri di wilayah tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan ketiga kabupaten yang lainnya. Di samping karena adanya kemauan dan kemampuan dari masing-masing daerah untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana ini, faktor letak geografis daerah tersebut terhadap kemudahan akses pada daerah sekitar terutama kota-kota besar yang dianggap menjadi pusat-pusat pertumbuhan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur ini.

Kondisi tipologi pertumbuhan daerah

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi pertumbuhan perekonomian Kabupaten dengan memperhatikan sektor perekonomian Provinsi sebagai daerah referensi. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Sjafrizal 1997, Kuncoro 1993, Hill 1989).

Dengan menggunakan matriks Klassen dapat dilakukan 4 (empat) pengelompokan daerah dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebagai indikator. Namun demikian, pengelompokan ini adalah bersifat dinamis karena sangat tergantung pada perkembangan kegiatan pembangunan di kabupaten yang bersangkutan. Perubahan akan mudah terjadi pada daerah-daerah yang kondisinya telah berada dekat dengan batas rata-rata dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita.

Tabel 1 .

Pengelompokan pertumbuhan kabupaten di wilayah Barlingmascakeb berdasarkan Klassen Typology tahun 2011

Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan di atas rata-rata	Laju pertumbuhan di bawah rata-rata
Pendapatan perkapita di atas rata-rata	Daerah maju Cilacap	Daerah maju tapi tertekan
Pendapatan perkapita di bawah rata-rata	Daerah berkembang Banjarnegara Purbalingga Banyumas	Daerah relatif terbelakang Kebumen

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan matriks Klassen (Tabel 1) Kabupaten Cilacap masuk kategori daerah maju. Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas masuk kategori daerah berkembang. Sedangkan Kabupaten Kebumen tetap masuk dalam kategori daerah kurang maju.

Studi ini menemukan bahwa terdapat perbedaan sektor ekonomi unggulan dan kompetitif di lima daerah yang bekerjasama. Mengacu pada teori pembangunan tidak berimbang (*unbalanced development*) dari Hirschman (1958), pengembangan kerjasama antar daerah di wilayah Barlingmascakeb sebaiknya difokuskan pada satu potensi daerah yang layak menjadi *leading sector* sehingga mampu menarik investasi untuk ditanamkan pada potensi-potensi daerah lainnya. Hal ini merupakan jalan terbaik untuk pengembangan ekonomi bagi kelima daerah yang bekerja sama. Pemilihan satu potensi daerah yang layak tentunya harus mempertimbangkan adanya nilai tambah yang akan diterima oleh tiap-tiap daerah. Strategi ini ditujukan untuk menguatkan komitmen bersama diantara daerah-daerah yang bekerja sama. Hal tersebut sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Chan dan Xian (2011:59) bahwa beberapa daerah tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam kerjasama kecuali ada nilai tambah atau manfaat yang diambil dari hasil kerjasama tersebut.

Perbedaan lain yang ditemukan adalah kondisi sarana dan prasarana penting bagi keberlangsungan ekonomi lokal yaitu pertanian, perdagangan, dan industri di wilayah Barlingmascakeb. Variasi kondisi tiga sarana dan prasarana penting ini tidak lepas dari komitmen dan kapasitas masing-masing daerah untuk mengembangkannya. Di samping itu, lokasi geografis daerah juga mempengaruhi aksesibilitas daerah terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya mendorong pengembangan infrastruktur dasar. Menurut Kuroda et al. (2007), peran infrastruktur yang menghubungkan wilayah yang bekerjasama sangat penting untuk mendorong peningkatan transformasi dan konektivitas diantara daerah yang bekerjasama. Oleh karena itu, tindakan aksi untuk mengurangi gap kondisi infrastruktur dasar yang berbeda adalah dengan lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan yang bersifat multilateral.

Dalam aspek tipologi pertumbuhan daerah, studi ini juga menemukan bahwa hanya satu daerah saja yaitu Cilacap yang masuk dalam kategori daerah maju. Sementara keempat daerah lainnya terbagi dalam kategori daerah berkembang dan kurang maju. Variasi kemajuan daerah secara ekonomi sebenarnya bukan kendala untuk bekerja sama. Studi yang dilakukan oleh Nakamura et al. (2011), menemukan bahwa kerjasama diantara daerah yang memiliki perbedaan kemampuan fiskal dapat terus dilakukan sepanjang motivasi kerjasama saling menguntungkan dan memberikan kontribusi yang positif dari hasil kerjasama tersebut.

Simpulan

Dari pembahasan di atas hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share Analysis* (SSA) masing-masing kabupaten memiliki sektor ekonomi yang bersifat unggulan dan kompetitif yang berbeda-beda. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila akan dilakukan kerjasama pengembangan potensi daerah, perlu dilakukan pilihan alternatif sektor-sektor yang layak untuk dikerjasamakan agar dapat memberikan keuntungan pada semua daerah yang bekerjasama. Dari analisis tipologi wilayah yang menggambarkan perbedaan kondisi sarana dan prasarana pertanian, perdagangan dan industri di ke lima kabupaten baik dari sisi jumlah dan kelengkapan, Kabupaten Banyumas dan Cilacap berada pada posisi hierarkhi I, Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen pada posisi hierarkhi II, sedangkan Kabupaten Purbalingga berada pada posisi hierarkhi III. Dari hasil analisis tipologi pertumbuhan daerah, Kabupaten Cilacap masuk kategori daerah maju, Kabupaten

Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas masuk kategori daerah berkembang, sedangkan Kabupaten Kebumen masuk kategori daerah kurang maju.

Daftar pustaka

- Agranoef R & McGuire M (2003) Collaborative Public Management. Washington D.C: George Town University Press.
- Bird RM & Vaillancourt F (2000) Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani K (2008) Model kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Riset Daerah 8(2):1053-1077
- Chan RCK & Xian S (2011) Assesing the incentives in regional city-to-city cooperation: A case study of Jiangyin-Jingjiang Industrial Park of Jiangsu Province in the Yangtse River Delta Region. Asia Pacific Viewpoint 53(1):56-69.
- Harsanto BT (2012) Analisis Kinerja Lembaga Kerjasama Antardaerah dalam Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah: Kajian Aspek Kelembagaan Studi Kasus Kerjasama Antar Daerah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Disertasi, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Hirschman AO (1958) The Strategy of Economic Development. Volume 10, Yale University Press.
- Kumorotomo W (2008) Desentralisasi Fiskal: Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro M (1993) Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan. *Analisis CSIS*, XXII(2), Maret-April.
- Kuroda H, Kawai M & Nangia R (2007) Infrastructure and regional cooperation. In Annual World Bank Conference on Development Economics 2007, Global: Rethinking Infrastructure for Development, edited by François Bourguignon and Boris Pleskovic. Washington, DC: World Bank.
- Li Y & Wu F (2012) Towards new regionalism? Case study of changing regional governance in the Yangtze River Delta. Asia Pacific Viewpoint 53(2):178–195.
- Marjoko (2010) Barlingmascakeb Sebagai Salah Satu Model Kerjasama Antar Daerah (Peluang, Tantangan & Permasalahan). Makalah Lokakarya Kerjasama Barlingmascakeb, Hotel Dynasti, Purwokerto.
- Nakamura H, Elder M & Mori H (2011) The surprising role of local governments in international environmental cooperation: The case of Japanese collaboration with developing countries. Journal of Environment & Development. Vol. 20(3):219-250.
- Olberding JC (2002) Does regionalism beget regionalism? The relationship between norms and regional partnership for economic development. Public Administration Review 62(4):432-43.
- Sjafrizal (1997) Pertumbuhan ekonomi dan regional indonesia bagian barat. Prisma, LP3ES, Nomor 3:27-38.
- Wahyudi (2010) Kajian Kerjasama Daerah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Tesis, Undip, Semarang.
- Zhao S (2011) China’s approaches toward regional cooperation in East Asia: Motivations and calculations. Journal of Contemporary China 20(68):53–67.